

**ANALISIS PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PERIODE TAHUN 2022 - 2023

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

DEBORA EKA MEYRIANTI

312231939

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

TUGAS AKHIR

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2022 - 2023

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DEBORA EKA MENYRIANTI

Nomor Induk Mahasiswa: 312231939

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S:Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Julianto Agung S., Dr., SE., S.Kom., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Atika Jauharita Hata, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 1 Juli 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN PERDERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2022 – 2023

Debora Eka Meyrianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Email : debbydebora578@gmail.com

ABSTRAC

The study entitled "Analysis of the Influence of the Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence, and the Degree of Fiscal Decentralization on the Original Regional Income of Temanggung Regency for the Period 2022 - 2023" aims to determine the influence of the Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and the Degree of Fiscal Decentralization Ratio on the Original Regional Income of Temanggung Regency. The method used is quantitative descriptive with secondary data collection in the form of documentation. The results of the study show that financial performance based on the Effectiveness Ratio is classified as effective with an average value of 115.1%. The Regional Financial Independence Ratio shows an instructive relationship pattern with an average of 23.36%, while the Degree of Fiscal Decentralization Ratio is classified as lacking with an average of 18.87%. In addition, it was found that the Effectiveness Ratio has no effect on Original Regional Income, while the Regional Financial Independence Ratio and the Degree of Fiscal Decentralization Ratio have an effect on Original Regional Income.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Ratio of Temanggung Regency

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2022 – 2023" bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas tergolong efektif dengan nilai rata – rata 115,1%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan pola hubungan instruktif dengan rata – rata 23,36%, sementara Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tergolong kurang dengan rata – rata 18,87%. Selain itu, ditemukan bahwa Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas peran penting akuntansi dalam pencatatan keuangan akibat globalisasi dan reformasi. Di Indonesia, struktur pemerintahan terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota, yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Sebelum otonomi daerah diterapkan, sistem pemerintahan lebih terpusat dengan kontrol penuh dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang

untuk mengatur daerahnya sendiri. Terjadinya perubahan ke sistem desentralisasi bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Penelitian dilakukan di BPKPAD Kabupaten Temanggung untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kontribusi pajak. Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio efektivitas, kemandirian keuangan daerah, dan derajat desentralisasi fiskal untuk mengevaluasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengelolaan keuangan daerah. Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai anggaran, sementara kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio derajat desentralisasi fiskal menilai kemampuan daerah dalam membiayai sendiri tanpa bergantung pada bantuan pusat. Penelitian ini bertujuan memahami kinerja pemerintah daerah Temanggung dalam mengelola pembiayaan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2022 – 2023. “ adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dalam mengelola dan bertanggung jawab atas pembiayaan daerahnya sendiri berdasarkan otonomi daerah.

I. TINJAUAN TEORI

Teori Stewardship

Penelitian ini berfokus pada teori stewardship dalam konteks teori keagenan, yang menyatakan bahwa manajemen

didorong oleh tujuan utama untuk kebaikan organisasi, bukan tujuan pribadi. Hipotesis ini menyatakan ada korelasi langsung antara kebahagiaan karyawan dan kinerja organisasi, di mana keberhasilan organisasi mencerminkan pemaksimalan utilitas para pemimpin dan manajemen.

Teori stewardship diterapkan dalam akuntansi sektor publik dan *non-profit* untuk menjawab tuntutan informasi antara pengurus dan prinsipal. Teori ini membantu menjelaskan peran Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang dapat diandalkan masyarakat untuk bertindak demi kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, serta menerima akuntabilitas keuangan.

Para pengelola, termasuk manajemen dan auditor internal, menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memastikan pengendalian internal yang efisien dan menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, guna mencapai tujuan ekonomi, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, guna mengidentifikasi perubahan posisi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Hasil perhitungan rasio keuangan harus dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat tren kinerja. Menurut Kasmir (2020), rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kamaludin dan Indriani (2021) menyatakan bahwa rasio keuangan membantu mengevaluasi laporan keuangan dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan perusahaan.

Kesimpulannya, rasio keuangan mengevaluasi dan menganalisis hasil usaha selama satu periode akuntansi dibandingkan dengan periode sebelumnya, untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan. Analisis rasio juga berfungsi sebagai alat peramalan kondisi keuangan dan hasil usaha di masa depan.

Rasio Efektivitas

Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai rencana. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas

mencakup daya guna, keaktifan, dan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan tujuan.

Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menunjukkan jangkauan akibat dan dampak program terhadap tujuan yang ditetapkan, dengan kontribusi output yang lebih besar menunjukkan proses kerja yang lebih efektif.

Menurut Mohammad (2016), semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target PAD. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut:

$$R. Efektivitas = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

R. Efektivitas = Rasio Efektivitas

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Tabel Presentase Rasio Efektivitas

No	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	Kurang Dari 60%	Sangat Tidak Efektif
2	60% - 80%	Tidak Efektif
3	81% - 90%	Cukup Efektif
4	91% - 100%	Efektif
5	> 100%	Sangat Efektif

Manfaat efektivitas sebagai alat ukur adalah untuk mengetahui apakah realisasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan.

Selain itu, efektivitas membantu mencapai hasil yang diharapkan, mengurangi penggunaan sumber daya, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, meningkatkan potensi keuntungan, dan meningkatkan kinerja unit kerja sehingga output yang dicapai maksimal.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat mengelola pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri dalam kerangka desentralisasi. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pemerintahannya, pembangunan masyarakat, dan pelayanan menggunakan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PT}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PT = Pendapatan Transfer

Tabel Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Patisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi 2019

Persentase kemandirian finansial suatu wilayah menunjukkan sejauh mana wilayah tersebut bergantung pada pendapatan transfer. Ketergantungan daerah terhadap bantuan menurun seiring meningkatnya kemandirian finansial.

Persentase kemandirian finansial juga mencerminkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi, yang meningkat seiring dengan kemandirian finansial daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Purba dan Hutabarat (2017) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam desentralisasi berkorelasi dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan komitmen PAD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Desentralisasi fiskal digunakan untuk mengelola pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah dan pusat. Keleluasaan dalam menangani dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan memperlancar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengelolaan keuangan daerah, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Desentralisasi fiskal melibatkan pengalihan kewenangan fiskal daerah untuk mendukung desentralisasi administratif dan politik. Di Indonesia, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kinerja ekonomi daerah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskalnya, mempertimbangkan kepentingan daerah dalam keputusan tentang pajak, pinjaman luar negeri, dan pengelolaan anggaran. Rumus tingkat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Tabel Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Purba dan Hutabarat, 2017

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, seperti yang dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah mencakup semua barang dan jasa hasil kegiatan ekonomi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan asal faktor produksinya. Menurut Abdul H. (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah sesuai undang-undang. Sektor pendapatan daerah penting untuk melihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Menurut Abdul H. (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis:

1. Pajak Daerah

Iuran wajib dari individu atau badan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sesuai UU No. 28 tahun 2009. Pajak daerah penting untuk kinerja keuangan di Kabupaten Temanggung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Retribusi Daerah

Pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah, juga berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan dari kekayaan daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau entitas lain, termasuk laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

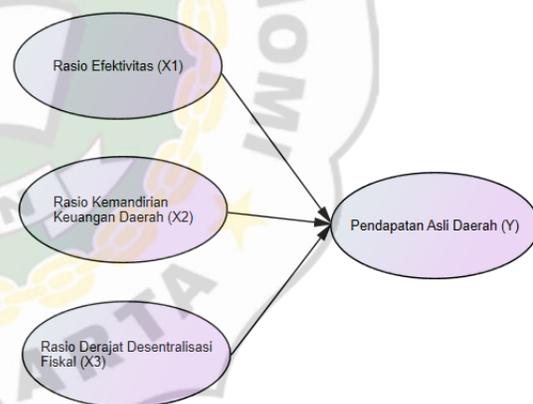
Sumber PAD lainnya seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pemanfaatan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar, serta komisi atau potongan dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

Keempat jenis pendapatan ini saling melengkapi dan berkontribusi terhadap kinerja keuangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung.

Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan penjabaran dari hubungan terhadap variabel – variabel dalam penelitian. Pada Penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan uraian diatas, kerangka Pikir penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar Kerangka Pikir



II. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti pengelolaan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022-2023 di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, yang berlokasi di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Temanggung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Temanggung, yang terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 870,65 km² dan dibatasi oleh Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, dan Kabupaten Wonosobo di barat. Wilayah ini sebagian besar merupakan dataran tinggi dan pegunungan, termasuk bagian dari Dataran Tinggi Dieng, serta dilalui oleh jalur provinsi yang menghubungkan Semarang dan Purwokerto.

BPKPAD bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, dan sebelumnya dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) sebelum berganti nama menjadi DPPKAD dan akhirnya BPKPAD.

Sampel dan Data Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu penetapan kriteria tertentu untuk memilih sampel. Kriteria yang digunakan adalah data sekunder time series berupa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung untuk periode 2022-2023.

Peneliti berpendapat bahwa pengambilan sampel dari laporan keuangan

selama dua tahun terakhir adalah yang terbaru dan relevan, sehingga dapat menggambarkan objek penelitian saat ini. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bukti, catatan, atau laporan historis yang telah didokumentasikan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk periode tersebut.

Teknik Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode untuk menentukan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk menunjukkan hubungan fungsional antara variabel-variabel tersebut. Sebelum melakukan analisis, model regresi harus memenuhi beberapa prasyarat, yang memungkinkan penulisan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

- Y : Nilai Variabel Terikat (PAD)
- a : Bilangan konstan
- b₁ : Koefisien regresi Rasio Efektivitas
- b₂ : Koefisien regresi RKKD
- b₃ : Koefisien regresi Rasio DDF
- x₁ : Nilai Variabel Bebas (X1)
- x₂ : Nilai Variabel Bebas (X2)
- x₃ : Nilai Variabel Bebas (X3)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear, penting untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi klasik, yaitu serangkaian persyaratan statistik yang harus dipenuhi agar model regresi menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan seperti:

- Uji Normalitas
- Uji Multikolinearitas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji Autokorelasi

III. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian suatu tujuan yang diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai rencana. Semakin tinggi rasio efektivitas suatu daerah, semakin efektif kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas untuk tahun 2022 dan 2023.

Tabel Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Tahun 2022	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Januari	20,515,365,396	296,358,641,240	6.92%	Sangat Tidak Efektif
Februari	50,313,245,863	296,358,641,240	16.98%	Sangat Tidak Efektif
Maret	74,992,829,215	296,358,641,240	25.30%	Sangat Tidak Efektif
April	101,847,990,798	296,358,641,240	34.37%	Sangat Tidak Efektif
Mei	132,324,456,502	296,358,641,240	44.65%	Sangat Tidak Efektif
Juni	161,300,331,854	296,358,641,240	54.43%	Sangat Tidak Efektif
Juli	202,558,570,505	296,358,641,240	68.35%	Tidak Efektif
Agustus	236,650,048,683	296,358,641,240	79.85%	Tidak Efektif
September	276,467,254,109	296,358,641,240	93.29%	Efektif
Oktober	230,773,859,922	296,358,641,240	77.87%	Tidak Efektif
November	260,617,881,299	296,358,641,240	87.94%	Cukup Efektif
Desember	300,303,126,712	296,358,641,240	101.33%	Sangat Efektif

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (diolah)

Dari data tersebut diperoleh bahwa Tingkat efektivitas keuangan daerah kabupaten Temanggung pada tahun 2022 berada pada kriteria sangat efektif karena dapat melebihi prosentase 100%, yaitu sebesar 101.33% yang berarti target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya telah tercapai.

Tabel Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tahun 2023	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Januari	22,579,483,497	303,730,612,722	7.43%	Sangat Tidak Efektif
Februari	46,771,921,295	303,730,612,722	15.40%	Sangat Tidak Efektif
Maret	74,456,416,935	303,730,612,722	24.51%	Sangat Tidak Efektif
April	116,637,356,762	303,730,612,722	38.40%	Sangat Tidak Efektif
Mei	146,616,160,533	303,730,612,722	48.27%	Sangat Tidak Efektif
Juni	176,324,195,393	303,730,612,722	58.05%	Sangat Tidak Efektif
Juli	228,200,545,145	303,730,612,722	75.13%	Tidak Efektif
Agustus	264,296,822,863	303,730,612,722	87.02%	Cukup Efektif
September	302,419,666,108	303,730,612,722	99.57%	Efektif
Oktober	337,761,798,651	303,730,612,722	111.20%	Sangat Efektif
November	356,331,437,682	303,730,612,722	117.32%	Sangat Efektif
Desember	391,423,479,859	303,730,612,722	128.87%	Sangat Efektif

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (diolah)

Dapat diperoleh data bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah kabupaten Temanggung pada tahun 2023 berada pada kriteria sangat efektif karena dapat melebihi prosentase 100%, yaitu sebesar 128.87% yang berarti target anggaran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang telah di tetapkan pada tahun sebelumnya telah tercapai.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan masyarakat melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan. Rasio ini dianalisis melalui empat pola hubungan: Instruktif, Konsultatif, Partisipatif, dan Delegatif. Tabel berikut menyajikan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Januari	20,515,365,396	124,578,503,500	16.47%	Instruktif
Februari	50,313,245,863	187,677,161,700	26.81%	Konsultatif
Maret	74,992,829,215	374,078,602,267	20.05%	Instruktif
April	101,847,990,798	497,739,849,425	20.46%	Instruktif
Mei	132,324,456,502	579,201,980,124	22.85%	Instruktif
Juni	161,300,331,854	701,896,434,202	22.98%	Instruktif
Juli	202,558,570,505	885,892,923,708	22.86%	Instruktif
Agustus	236,650,048,683	1,034,909,869,863	22.87%	Instruktif
September	276,467,254,109	1,175,172,426,275	23.53%	Instruktif
Oktober	230,773,859,922	1,364,444,345,168	16.91%	Instruktif
November	260,617,881,299	1,411,429,685,554	18.46%	Instruktif
Desember	300,303,126,712	1,657,879,580,367	18.11%	Instruktif
Rata-Rata			21.03%	Instruktif

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (diolah)

Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata – rata kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 berada di pola hubungan instruktif karena berada pada interval 0 – 25% yaitu dengan prosentase sebesar 21.03%.

Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tahun 2023	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
Januari	22,579,483,497	99,268,001,950	22.75%	Instruktif
Februari	46,771,921,295	156,033,445,544	29.98%	Konsultatif
Maret	74,456,416,935	309,515,090,949	24.06%	Instruktif
April	116,637,356,762	431,538,393,198	27.03%	Instruktif
Mei	146,616,160,533	538,911,863,005	27.21%	Konsultatif
Juni	176,324,195,393	677,783,674,369	26.01%	Konsultatif
Juli	228,200,545,145	899,810,189,188	25.36%	Instruktif
Agustus	264,296,822,863	992,091,416,230	26.64%	Konsultatif
September	302,419,606,108	1,167,118,292,816	25.91%	Instruktif
Oktober	337,761,798,651	1,331,168,568,629	25.37%	Instruktif
November	356,331,437,682	1,467,624,409,910	24.28%	Instruktif
Desember	391,423,479,859	1,653,587,318,227	23.67%	Instruktif
Rata-Rata			25.69%	Instruktif

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (diolah)

Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata – rata kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 berada di pola hubungan instruktif karena berada pada interval 0 – 25% yaitu dengan prosentase sebesar 25.69%.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) adalah indikator penting yang mengukur komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio DDF yang lebih tinggi menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Tabel berikut menyajikan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Tabel Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Tahun 2022	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi TPD(Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
Januari	20.515.365.396	145.102.868.896	14.14%	Kurang
Februari	50.313.245.863	237.990.407.563	21.14%	Cukup
Maret	74.992.829.215	449.071.431.482	16.70%	Kurang
April	101.847.990.798	599.587.840.223	16.99%	Kurang
Mei	132.324.456.502	711.526.445.626	18.60%	Kurang
Juni	161.300.331.854	863.196.766.056	18.69%	Kurang
Juli	202.558.570.505	1.088.451.494.213	18.61%	Kurang
Agustus	236.650.048.683	1.271.559.918.546	18.61%	Kurang
September	276.467.254.109	1.451.639.680.384	19.05%	Kurang
Oktober	230.773.859.922	1.595.218.205.090	14.47%	Kurang
November	260.617.881.299	1.672.047.566.853	15.59%	Kurang
Desember	300.303.126.712	1.959.182.707.079	15.33%	Kurang
Rata-Rata			17.32%	Kurang

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (ditolah)

Dari data di atas dapat diperoleh rata – rata derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2022 adalah sebesar 17.32%, yang berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 masih tergolong kurang karena berada pada interval 10,01 – 20,00%.

Tabel Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tahun 2023	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi TPD(Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
Januari	22.579.483.497	121.847.485.447	18.53%	Kurang
Februari	46.771.921.295	202.805.366.839	23.06%	Cukup
Maret	74.456.416.935	383.971.507.884	19.39%	Kurang
April	116.637.356.762	548.175.749.960	21.28%	Cukup
Mei	146.616.160.533	685.528.023.538	21.39%	Cukup
Juni	176.324.195.393	854.107.869.762	20.64%	Cukup
Juli	228.200.545.145	1.128.010.734.333	20.23%	Cukup
Agustus	264.296.822.863	1.256.388.239.093	21.04%	Cukup
September	302.419.666.108	1.469.537.958.924	20.58%	Cukup
Oktober	337.761.798.651	1.668.930.367.280	20.24%	Cukup
November	356.331.437.682	1.823.955.847.592	19.54%	Kurang
Desember	391.423.479.859	2.045.186.087.786	19.14%	Kurang
Rata-Rata			20.42%	Cukup

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Temanggung (ditolah)

Dari data di atas dapat diperoleh rata – rata derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2023 adalah sebesar 20.42%, yang berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 tergolong cukup karena berada pada interval 20,01 – 30,00%.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara umum, termasuk nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (max), nilai terendah (min), dan standar deviasi dari variabel – variabel seperti Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Tabel berikut menyajikan hasil dari analisis statistik deskriptif tersebut.

Tabel Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Efektivitas (X1)	24	6,92	128,87	62,6021	36,59924	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)	24	16,47	29,98	23,3596	3,48340	
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3)	24	14,14	23,06	18,8742	2,32010	
Pendapatan Asli Daerah (Y)	24	-45693394187	51876349752	28821941940	17654661575,102	
Valid N (listwise)	24			940,46		

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, Rasio Efektivitas (X1) memiliki nilai minimum sebesar 6,92, nilai maksimum 128,87, nilai rata-rata 62,6021, dan standar deviasi 36,59924 selama periode 24 bulan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) menunjukkan nilai minimum 16,47, nilai maksimum 29,98, nilai rata-rata 23,3596, dan standar deviasi 3,48340 untuk periode yang sama.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) memiliki nilai minimum 14,14, nilai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maksimum 23,06, nilai rata-rata 18,8742, dan standar deviasi 2,32010 selama 24 bulan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar -45.693.394.187, nilai maksimum 51.876.349.752, nilai rata – rata 28.821.941.940,46, dan standar deviasi 17.654.661.575,102 untuk periode 24 bulan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	24	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0006256
	Std. Deviation	14491658975,64
		168400
Most Extreme Differences	Absolute	,196
	Positive	,132
	Negative	-,196
Test Statistic	,196	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,018 ^c	
Exact Sig. (2-tailed)	,278	
Point Probability	,000	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,018, yang lebih kecil dari 0,05, sementara nilai Exact. Sig. (2-tailed) adalah 0,278, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga persyaratan untuk uji normalitas model regresi belum terpenuhi.

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance/VIF
1	(Constant)	-	15100959437		-2,045	,054	
		308761353	7,961				
		084,926					
	Rasio Efektivitas (X1)	4223672,6	93286593,879	,009	,045	,964	,901
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)	-	30328563842	-10,847	-1,813	,085	,001
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3)	549737167	820				1062,926
		11,274					6
		16630,191	16318,868	,192	1,019	,320	,995
							1,005

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas, nilai tolerance dan VIF menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada Rasio Efektivitas (X1) dengan nilai tolerance 0,901 > 0,1 dan VIF 1,110 < 10. Namun, pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), terdapat gejala multikolinearitas dengan nilai tolerance 0,001 < 0,1 dan VIF 1062,926 > 10. Untuk Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan nilai tolerance 0,995 > 0,1 dan VIF 1,005 < 10.

Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,571 ^a	,326	,225	15540572925,2	2,361
				89	

- a. Predictors: (Constant), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)
- b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi, model regresi memiliki nilai D – W Test = 2,361 yang berarti bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Maka dari data tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji autokorelasi model regresi sudah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model ini.

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	.201	1,829		,110	,913
	Rasio Efektivitas (X1)	,001	,001	,259	1,089	,290
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)	,051	,357	1,024	,143	,888
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3)	-.070	,538	-.934	-.130	,898

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi Rasio Efektivitas (X1) sebesar $0,290 > 0,05$, nilai signifikansi Rasio Kemandirian Kemandirian Keuangan Daerah (X2) sebesar $0,888 > 0,05$, nilai signifikansi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) sebesar $0,898 > 0,05$. Sehingga dapat diperoleh Kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Analisis Regresi Linear Berganda Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	308761353085,005	60403837751,172		-5,112	,000
	Rasio Efektivitas (X1)	4223672,630	37314637,551	,013	,113	,911
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)	54973716711,290	26	-16,464	-4,532	,000
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3)	85910124119,207	18209853318,287	17,137	4,718	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Constanta (a) adalah -308761353085,005, nilai Rasio Efektivitas (X1) adalah 4223672,630, nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) adalah -54973716711,290, dan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) adalah 85910124119,207. Persamaan regresi dapat ditentukan sebagai berikut:

$$Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3$$

$$Y = -308761353085,005 + 4223672,630X1 - 54973716711,290X2 + 85910124119,207X3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa:

- Y adalah Pendapatan Asli Daerah
- Jika nilai b1 adalah nilai dari Rasio Efektivitas (X1) sebesar 4223672,630 yang berpengaruh positif terhadap (Y), maka artinya apabila (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD (Y) akan meningkat sebesar 4223672,630 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai b2 adalah nilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) sebesar -54973716711,290 yang berpengaruh negatif terhadap (Y), maka artinya apabila (X2) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD (Y) akan menurun sebesar -54973716711,290 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai b3 adalah nilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) sebesar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

85910124119,207 yang berpengaruh positif terhadap (Y), maka artinya apabila (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD (Y) akan meningkat sebesar 85910124119,207 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Analisis Koefisiensi Korelasi dan Determinasi

Tabel Koefisiensi Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,867 ^a	,752	,714	6216229170,11425

a. Predictors: (Constant), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)

Berdasarkan tabel di atas, nilai R yang dihasilkan adalah 0,867, menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Nilai Adjusted R Square adalah 0,714 atau 71,4%, yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dapat dijelaskan oleh Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) adalah 71,4%. Sisanya, 28,6% variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dijelaskan oleh variabel lain selain (X1), (X2), dan (X3).

Hasil Analisis Uji F

Tabel Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2338614595697	3	7795381985659	3,228	,044 ^b
	Residual	732700000,000	20	10900000,000		
Total		4830188136924				
		455000000,000				
		7168802732622	23			
		188000000,000				

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)

Berdasarkan tabel diatas, pada uji F diperoleh nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), serta Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), sehingga secara menyakinkan dapat menjelaskan variabel dependen.

Hasil Analisis Uji t

Berdasarkan tabel Analisis Regresi Linear Berganda, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Rasio Efektivitas (X1) adalah $0,911 > 0,05$, sehingga Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap PAD (Y). Nilai signifikansi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) adalah $0,000 < 0,05$, sehingga Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD (Y). Nilai signifikansi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) juga $0,000 < 0,05$,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal signifikan terhadap PAD (Y).

Hasil Analisis Regresi

Setelah analisis regresi linear berganda, dilakukan Uji F dan Uji t untuk mengevaluasi pengaruh Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil Uji F menunjukkan bahwa ketiga rasio tersebut secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Namun, Uji t menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas (X1) tidak berpengaruh, sementara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian Tugas Akhir diatas mengenai “Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2022 – 2023” mendukung teori stewardship, yang menekankan kepentingan bersama dalam melayani

masyarakat untuk kesejahteraan daerah. Hasil penelitian menunjukkan:

1. Rasio Efektivitas

Kinerja keuangan Kabupaten Temanggung tergolong efektif dengan rata-rata 115,1%, melebihi 100%, karena penerimaan pajak dan retribusi daerah melebihi anggaran.

2. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan Kabupaten Temanggung sangat rendah dengan rata-rata 23,36%, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan berdasarkan rasio ini tergolong kurang dengan rata-rata 18,87%, menunjukkan PAD yang masih kurang untuk membiayai pembangunan daerah.

4. Pengaruh Rasio

Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Temanggung.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan Penulis

Penelitian yang penulis lakukan pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang peneliti hadapi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini, terutama data keuangan daerah dan indikator ekonomi dan sosial di Kabupaten Temanggung, yang mempengaruhi kualitas analisis.
2. Proses pengumpulan data yang memakan waktu lama, menghambat peneliti dalam melakukan penelitian secara maksimal.
3. Kendala dalam pengujian asumsi klasik normalitas, di mana data tidak berdistribusi normal, serta gejala multikolinearitas pada rasio kemandirian keuangan daerah (X_2), yang mungkin disebabkan oleh jumlah sampel atau data yang terlalu kecil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi melalui percepatan penyusunan peraturan daerah, perubahan tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia, serta pengawasan berkala dan mendadak.

Perbaiki proses pengawasan dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak dan petugas pajak juga diperlukan. Strategi ini diharapkan meningkatkan PAD, mendukung kemandirian keuangan daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta peningkatan PAD yang akan berdampak positif pada infrastruktur, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan rasio dan teknik analisis yang lebih beragam serta sampel data yang lebih banyak untuk menghasilkan hasil yang lebih reliabel dan akurat.

Penelitian mendatang diharapkan memberikan temuan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States*. *Journal of Urban Economics*, vol.52, pp: 93-108.
- Dwirandra. 2014. *PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN KAPUBATEN DAN KOTA*. Universitas Udayana : Bali.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Ghozali, Imam. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2017 : 134). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dairi.. *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1 (1) : 228-240.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Saputra. 2014. *ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT*. Universitas Negeri Padang : Sumatera Barat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surbakti. 2013. *PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PUBLIK KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA*. UPN “Veteran” : Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.